



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA PANSUS
RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : V
Rapat ke :
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Dengan : 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri BUMN
3. Kepala BKPM
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 9 Juni 2021
Waktu : 14.42 s.d. 17.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3
Acara : Penjelasan terkait kebijakan dan implementasi dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 21 anggota dari 30 orang anggota Pansus.
- 9 hadir fisik
- 11 hadir virtual
- 1 Izin
2. Pemerintah:
a. Menteri Investasi.
b. Menteri Perdagangan.
3. Wakil Menteri BUMN.
3. DPD RI

I. **PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di pimpin oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka pada pukul 14.42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. **KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

1. Pansus DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Investasi, Menteri Perdagangan, dan Wakil Menteri BUMN, baik secara fisik maupun virtual

dalam forum Rapat Kerja Pansus DPR RI hari ini, beserta penjelasan dan data yang disampaikan.

2. Pansus DPR RI dapat menerima usulan dari tiga kementerian, baik yang terkait dengan materi RUU maupun materi di luar RUU, untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi fraksi-fraksi dalam penyusunan DIM.
3. Pansus DPR RI memandang perlu adanya koordinasi dan sinergitas antara Kementerian Investasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam satu tim kerja pemerintah dalam pembahasan RUU.
4. Pansus DPR RI menyambut baik usulan Menteri Investasi untuk melakukan afirmasi guna mendorong percepatan pembangunan manusia (SDM Unggul), investasi yang menghormati hak-hak masyarakat adat, dan prinsip bahwa Papua harus mendapatkan bagi hasil secara proporsional atas industri dari sumber daya alam Papua.
5. Pansus DPR RI mendorong kementerian terkait untuk menyusun berbagai kebijakan khusus di Papua dalam rangka mempercepat terwujudnya tujuan Otsus di Papua.
6. Pansus DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait untuk menyusun kebijakan dalam rangka pendistribusian logistik, agar tercipta harga di Papua yang sama dengan wilayah lain di Indonesia.
7. Pansus DPR RI meminta Menteri Investasi untuk mempercepat penyelesaian persoalan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, serta membangun *smelter* di Tanah Papua.
8. Pansus DPR RI mendukung program Kementerian BUMN untuk merekrut putra-putri Papua lebih banyak lagi dalam lapangan pekerjaan di sektor BUMN.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

KETUA PANSUS



KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.
A.263